



**HUBUNGAN AKSI-REAKSI ANTARA PEMERINTAH  
ORDE BARU DAN KELOMPOK PETISI 50 1980-1998**

**Skripsi**

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata-1 dalam Ilmu Sejarah**

**Disusun Oleh:**

**Faisal Rahman  
NIM 13030114140086**

**FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2019**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya, Faisal Rahman, menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan karya ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan baik Strata Satu (S1), Strata Dua (S2), maupun Strata Tiga (S3) pada Universitas Diponegoro maupun perguruan tinggi yang lain.

Semua informasi yang dimuat dalam karya ilmiah ini yang berasal dari penulis lain baik yang dipublikasikan maupun tidak telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dan semua isi dari karya ilmiah/skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya pribadi sebagai penulis.

Semarang, 12 Desember 2019  
Penulis,

Faisal Rahman  
NIM 13030114140086

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

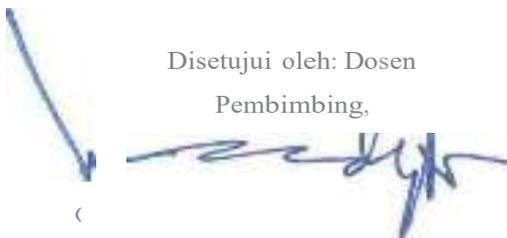
### *MOTTO*

*“Tetapi nyatalah bahwa kekuasaan atas orang banyak yang dilakukan oleh orang-seorang, yaitu raja, atau oleh satu golongan kecil oligarkhi, pada dasarnya oleng kedudukannya”-Demokrasi Kita*

Mohammad Hatta

Dipersembahkan untuk:  
Keluarga dan  
Departemen Sejarah

Disetujui oleh: Dosen  
Pembimbing,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned to the right of the text above.

Dr. Indriyanto, S.H, M.Hum.  
NIP 196407111990011001

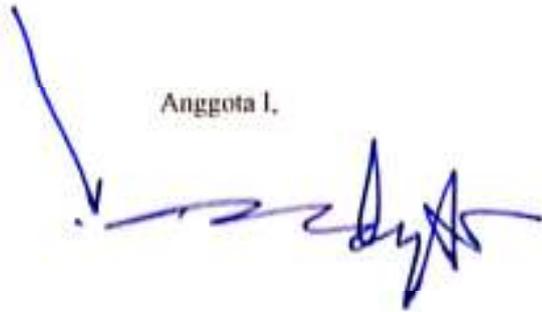
Skripsi dengan judul "Hubungan Aksi-Reaksi antara Pemerintah Orde Baru dan Kelompok Petani 50 1980-1998" yang disusun oleh Faisal Rahman (NIM 13030114140086) telah diterima dan disahkan oleh panitia ujian skripsi Program Strata-1 Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro pada hari Senin, 6 Januari 2020.

Ketua,



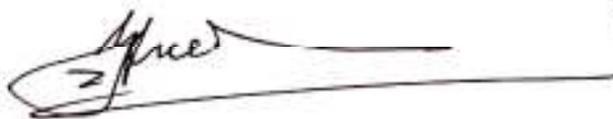
Prof. Dr. Dewi Yulianti, M.A.  
NIP 195407251986032001

Anggota I,



Dr. Indriyanto, S.H, M.Hum.  
NIP 196407111990011001

Anggota II,



Prof. Dr. Yety Rochwulaningsih, M.Si.  
NIP 196106051986032001

Anggota III,



Rabith Jihan A, S.S, M.Hum.  
NIP 198307192009121004

Mengesahkan,  
Dekan



Dr. Nurhasanah, M.Hum.  
NIP 196110041990012001

## KATA PENGANTAR

Segenap puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Hubungan Aksi-Reaksi antara Pemerintah Orde Baru dan Kelompok Petisi 50 1980-1998” sebagai syarat utama menyelesaikan studi pada Program Strata-1 Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas binaan, bimbingan dan petunjuk, kepada yang terhormat: Dr. Nurhayati, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro dan Dr.Dhanang Respati Puguh, M.Hum., selaku Ketua Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, yang telah memberikan izin dan kemudahan bagi penulis dalam penulisan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Dr. Indriyanto, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing yang telah berbagi ilmu, serta memberikan pengarahan, saran dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi ini. Suatu pengalaman menarik selama masa studi. Terima kasih kepada Dra. Sri Indrahti, M.Hum., selaku dosen wali yang telah memberikan konsultasi akademik selama masa studi penulis. Terima kasih juga penulis haturkan kepada segenap dosen penguji: Prof. Dr. Dewi Yuliati, M.A., Prof. Dr. Yety Rochwulaningsih, M.Si., Rabith Jihan A, S.S, M.Hum., yang telah memberikan saran dan kritik yang membangun bagi skripsi ini.

Terima kasih penulis haturkan kepada segenap pengajar Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu atas bekal ilmu pengetahuan yang telah diberikan. Terima kasih juga penulis haturkan kepada segenap staf administrasi Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro Mbak Fatma, Mas Oscar, Pak Romli dan Pak Martoyo yang telah memberikan pelayanan secara maksimal. Ucapan terima kasih tidak lupa penulis haturkan kepada segenap staf Arsip Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan Nasional, Museum Pers, Perpustakaan Universitas Gajah Mada, Perpustakaan Universitas Indonesia, Perpustakaan Diponegoro, Pusat Informasi

Kompas dan Depo Arsip Suara Merdeka atas pelayanan dan arahan sehingga penulis mampu mendapatkan sumber primer dan sekunder dalam penelitian skripsi ini.

Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua dan adik yang selalu memberikan doa, dukungan secara moril maupun materil, nasihat dan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai.

Terima kasih kepada rekan-rekan Sejarah angkatan 2014 yang telah memberikan waktu, dukungan dan bantuan sehingga skripsi ini bisa selesai. Secara khusus penulis ucapkan terima kasih yang tak terbatas kepada kawan-kawan seperjuangan, seperkotoran, senasib dan sepenanggungan: Tomi, Dian, Nico, Akbar, Ricky, Richie, Aul, Azwin, Imadudin, Dika, Putero, Olga, Daniel, Rangga, Ihsan, Fijar, Adit, Bayu, Sarah, Alfi, Manda, Aivy, Yulita, Anggun yang telah memberikan dukungan, bantuan, motivasi, saran dan kritikan. Perbedaan bukan hambatan untuk saling berbagi kebaikan. Untuk Galang Pijar Tri Pangestu terima kasih telah mau berteman dan berbagi tawa, mimpimu ke Mahameru sudah kuwalkilkan, dan saya akan terus bermimpi. Terima kasih kepada rekan-rekan Badan Eksekutif Mahasiswa Kabinet Harmoni. Tak lupa penulis haturkan terima kasih kepada rekan-rekan Himpunan Mahasiswa Sejarah 2016 dan UKM Peduli Sosial yang telah memberikan pengalaman. Terima kasih kepada Herintasari Ciptaning Wigati atas waktu, dukungan dan motivasi selama proses studi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tentu tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk kepentingan akademik dan mendorong kemajuan peradaban manusia. Selain itu, penulis berharap ada penelitian lebih lanjut mengenai skripsi ini.

Semarang, 12 Desember 2019

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	i
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b>	ii
<b>HALAMAN <i>MOTTO</i> DAN PERSEMBAHAN</b>	iii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b>	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	v
<b>KATA PENGANTAR</b>	vi
<b>DAFTAR ISI</b>	viii
<b>DAFTAR SINGKATAN</b>	x
<b>DAFTAR ISTILAH</b>	xiii
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	xiv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	xv
<b>ABSTRAK</b>	xvi
<b><i>ABSTRACT</i></b>	xvii
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
	A. Latar Belakang dan Permasalahan 1
	B. Ruang Lingkup 6
	C. Tujuan Penelitian 8
	D. Tinjauan Pustaka 8
	E. Kerangka Pemikiran 12
	F. Metode Penelitian dan Penggunaan Sumber 15
	G. Sistematika Penulisan 17
<b>BAB II</b>	<b>PROLOG TERJADINYA PETISI 50</b>
	A. Soeharto dan Supremasi Orde Baru 18
	B. Terbentuknya Fosko dan LKB 24
	C. Pancasila sebagai Paradigma Ideologi Negara 32
	D. Pidato Pekanbaru dan Cijantung 36
<b>BAB III</b>	<b>PERTUMBUHAN DAN REAKSI KELOMPOK PETISI 50 TERHADAP PEMRINTAH ORDE BARU</b>
	A. Terbentuknya Kelompok Petisi 50 39
	1. Surat Keprihatinan 39
	2. Terbentuknya “Study Group” Kelompok Kerja Petisi 50 44
	B. Reaksi Kelompok Petisi 50 46
	1. Tahun 1980-1991 46
	a. Reaksi Kelompok Petisi 50 terhadap Kebijakan Pemilu 1982 47
	b. Reaksi Kelompok Petisi 50 terhadap Peristiwa Tanjung Priok 52
	c. Reaksi Kelompok Petisi 50 terhadap Kebijakan Pemilu 1987 56

	d. Reaksi Kelompok Petisi 50 terhadap Kebijakan Cekal	58
	2. Tahun 1991-1998	59
	a. Reaksi Kelompok Petisi 50 terhadap Dinamika Golkar	60
	b. Reaksi Kelompok Petisi 50 terhadap Krisis Dan reformasi	62
	C. Hubungan Kelompok Petisi 50 dengan Masyarakat dan Mahasiswa	64
<b>BAB IV</b>	<b>REAKSI PEMERINTAH TERHADAP KELOMPOK PETISI 50</b>	
	A. Reaksi Pemerintah terhadap Kelompok Petisi 50	
	1. Reaksi Pemerintah terhadap Surat Keprihatinan	71
	2. Sikap Represif Pemerintah terhadap Kelompok Petisi 50	77
	a. Pelarangan Tulisan	78
	b. Larangan Mengikuti Kegiatan Kemasyarakatan dan Kenegaraan	83
	c. <i>Black Out</i>	86
	d. Pembatasan Fasilitas Bisnis	88
	e. Cekal	90
	f. Kasus Hukum Subversif dan Penghinaan Presiden	93
	B. Proses Dialog Pemerintah dengan Kelompok Petisi 50	100
	1. Dialog Pemerintah dengan Kelompok Petisi 50	101
	2. Diundang dalam Acara Kenegaraan	109
	3. Izin Berpergian ke Luar Negeri	112
	4. Pemberitaan oleh Media Pers	114
	5. Non Rekonsiliasi Pemerintah	115
<b>BAB V</b>	<b>SIMPULAN</b>	118
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	121
	<b>LAMPIRAN</b>	128

## DAFTAR SINGKATAN

ABRI	: Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
AD	: Angkatan Darat
AL	: Angkatan Laut
AMD	: ABRI Masuk Desa
AU	: Angkatan Udara
BAKIN	: Badan Koordinasi Intelijen Negara
BAP	: Berita Acara Pemeriksaan
BCA	: <i>Bank Central Asia</i>
BPIS	: Badan Pengelola Industri Strategis
BPPT	: Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
Cekal	: Cegah Tangkal
Dirjen	: Direktur Jenderal
DPA	: Dewan Pertimbangan Agung
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Fosko	: Forum Studi dan Komunikasi
G30S	: Gerakan 30 September
GBHN	: Garis Besar Haluan Negara
Golkar	: Golongan Karya
Hankam	: Pertahanan dan Keamanan
HUT	: Hari Ulang Tahun
IPTN	: Industri Pesawat Terbang Nusantara
Kapolri	: Kepala Polisi Republik Indonesia
Kasad	: Kepala Staf Angkatan Darat
Kassospol	: Kepala Staf Sosial Politik
KKN	: Korupsi Kolusi dan Nepotisme
KKPL	: Kelompok Kerja Petisi Limapuluh
KLM	: <i>Koninklijke Luchtvaart Maatschappij</i>

Kodam	: Komando Daerah Militer
Kopkamtib	: Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban
Koramil	: Komando Rayon Militer
Kostrad	: Komando Strategis Angkatan Darat
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
LKB	: Lembaga Kesadaran Berkonstitusi
Mendagri	: Menteri Dalam Negeri
Menhamkam	: Menteri Pertahanan dan Keamanan
Menkopolkam	: Menteri Koordinasi Politik dan Keamanan
Menpen	: Menteri Penerangan
Menristek	: Menteri Riset dan Teknologi
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
NKK	: Normalisasi Kehidupan Kampus
OKP	: Organisasi Kepemudaan
Ormas	: Organisasi Masyarakat
P4	: Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
PAL	: Penataran Angkatan Laut
Pangab	: Panglima ABRI
Pangkopkamtib	: Panglima Koptamtib
Parpol	: Partai Politik
PDI	: Partai Demokrasi Indonesia
Pemda	: Pemerintah Daerah
Pemilu	: Pemilihan Umum
PKI	: Partai Komunis Indonesia
PNI	: Partai Nasional Indonesia
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
Poldagri	: Politik Dalam Negeri
Pokja	: Kelompok Kerja
Polkam	: Politik dan Keamanan
PPP	: Partai Persatuan Pembangunan
PRJ	: Pekan Raya Jakarta

PT	: Perusahaan Terbatas
PTUN	: Pengadilan Tata Usaha Negara
PU	: Pekerjaan Umum
Rapim	: Rapat Pimpinan
Rakor	: Rapat Koordinasi
Repelita	: Rencana Pembangunan Lima Tahun
RUU	: Rancangan Undang-Undang
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
TVRI	: Televisi Republik Indonesia
UD	: Usaha Dagang
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
YLKB	: Yayasan Lembaga Kesadaran Berkonstitusi

## DAFTAR ISTILAH<sup>1</sup>

<i>blacklist</i>	: Daftar nama orang atau organisasi yang dianggap membahayakan keamanan.
<i>blackout</i>	: Sensor pada berita yang terkait dengan topik tertentu, khususnya di media massa dengan alasan apapun,
cekal	: Larangan untuk keluar dan masuk dalam wilayah Republik Indonesia.
<i>dissident</i>	: Orang yang tak sepakat/setuju; dianggap pembangkang.
<i>colling of period</i>	: Masa peredaan suatu masalah atau konflik.
<i>geruisloss</i>	: Penyitaan secara diam-diam.
<i>Mission oriented</i>	: Berorientasi terhadap tugas kepada anggota militer.
patrimonial	: Kekuasaan negara berdasarkan kewenangan tradisional.
Pernyataan Keprihatinan	: Sebuah petisi yang ditandatangani oleh lima puluh orang warga negara Indonesia tanggal 5 Mei 1980.
Pragmatis	: Mengenai atau bersangkutan dengan nilai-nilai praktis.
prinsipil	: Mengenai atau berhubungan dengan prinsip (asas); yang terpenting; bagian utama (pokok) mendasar.

---

<sup>1</sup>Pengertian dalam daftar istilah ini disusun berdasar pada pendapat para ahli dalam kamus, referensi, dan buku-buku ilmiah lainnya.

## DAFTAR GAMBAR

- |     |   |     |
|-----|---|-----|
| 4.1 | Sejumlah Mantan Pejabat Tinggi Minta Penjelsan Soal Cekal, <i>Media Indonesia</i> , 8 Mei 1991.   | 102 |
| 4.2 | Dialog Ali Sadikin-Sudomo; Belum Ada Titik Temu, <i>Media Indonesia</i> , 22 Mei 1991.  | 104 |
| 4.3 | Karikatur Kelompok Petisi 50 oleh Oom Pasikom”, <i>Kompas</i> , 10 Juli 1993.   | 105 |
| 4.4 | Menko Polkam, Menhamkam dan Pangab Menemui AH Nasution di RSPAD *HR Dharsono Juga Dijenguk Pangab dan Wakil KSAD Bersama Pak Nas, <i>Kompas</i> , 14 Juli 1993. | 108 |
| 4.5 | Ali Sadikin Ikut Tekan Tombol Peluncuran Dua Kapal PT.PAL, <i>Kompas</i> , 4 Juni 1993.   | 111 |

## DAFTAR LAMPIRAN

A.	Risalah Sidang Koordinasi Bidang Politik dan Keamanan Tingkat Staff Tanggal 11 Pebruari 1982, Arsip Sekretariat Wakil Presiden.	128
B.	Saran mengenai Pemilihan Umum 1987, Skretaris Wakil Presiden Umar Wirahadikusumah no.649.	133
C.	Laporan Ketua Pokja Penerangan pada Rapat Koordinasi Bidang Polkam Tingkat Staff tanggal 8 September 1980.	139
D.	Laporan Departemen Penerangan RI pada Rapat Koordinasi Bidang Polkam 20 Oktober 1980.	143
E.	Risalah Rapat Koordinasi Bidang Politik dan Keamanan Tingkat Staff 8 April 1982.	145
F.	Risalah Keputusan Rapat Koordinasi Bidang Polkam Tingkat Menteri 26 Ferbuari 1981	150

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Hubungan Aksi-reaksi antara Pemerintah Orde Baru dan Kelompok Petisi 50 1980-1998” mengkaji bagaimana hubungan reaktif pemerintah sebagai negara dengan Kelompok Petisi 50 sebagai kelompok kepentingan dari tahun 1980 sampai tahun 1998. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana pemerintah bereaksi terhadap Kelompok Petisi 50 yang menyuarakan koreksi dan demokratisasi kehidupan politik. Untuk mengkaji permasalahan tersebut maka digunakan metode sejarah yaitu heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Sebagai kerangka pemikiran, skripsi ini menggunakan pendekatan politik melalui konsep Hegemoni, Kelompok Kepentingan Anomik dan Konflik. Dengan temuan sumber dokumen terbaru dari Arsip Nasional Republik Indonesia, serta pembahasan yang lebih lengkap, diharapkan penelitian ini mampu untuk melengkapi penelitian yang telah ada sebelumnya.

Pemerintah Orde Baru sebagai penguasa mengambil kebijakan-kebijakan politik demi mempertahankan *status quo* sementara Kelompok Petisi 50 memiliki cita-cita kehidupan politik yang lebih demokratis. Perbedaan pandangan mengenai Pancasila dan UUD 1945 menimbulkan konflik reaktif diantara keduanya. Surat Keprihatinan 5 Mei 1980 merupakan awal pertentangan Kelompok Petisi 50 dengan pemerintah Orde Baru. Hegemoni pemerintah Orde Baru menghasilkan beberapa kebijakan politik yang kontroversial. Kelompok Petisi 50 yang bermula dari gerakan moral berubah menjadi kelompok kepentingan yang anomik dengan terbentuknya kelompok kerja. UUD Pemilu, UUD Papol dan Golkar dan UUD Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD adalah isu utama yang dikritisi oleh Kelompok Petisi 50 selama 1980 sampai 1991. Sebagai kelompok kepentingan, mereka memiliki hubungan mutualisme dengan kelompok kritis lain seperti mahasiswa, cendekiawan dan LSM.

Kepentingan pemerintah dalam dominasi kehidupan politik terbentur dengan gagasan demokrasi yang disuarakan oleh Kelompok Petisi 50. Atas eksistensi Kelompok Petisi 50, pemerintah bertindak secara reaktif terhadap perkembangan kelompok tersebut. Kebijakan represif yang diambil pemerintah dalam upaya mengekang aktifitas politik mereka yaitu larangan tulisan, larangan dalam kegiatan masyarakat, *blackout*, pembatasan fasilitas bisnis, cekal dan kasus hukum subversif. Menariknya selama tahun 1991-1993 pemerintah dan Kelompok Petisi 50 mengadakan dialog yang menghasilkan dispensasi dari kebijakan sebelumnya. Kelompok Petisi 50 diizinkan untuk berpergian ke luar negeri, diundang dalam acara kenegaraan dan diperbolehkan untuk diliput media pers. Sebagai kelompok kepentingan dengan tokoh-tokoh lama Kelompok Petisi 50 memiliki posisi tawar yang mengakibatkan pemerintah bersedia melakukan dialog dan dispensasi. Implikasi tersebut membuktikan bahwa di tengah pemerintah yang represif terdapat kekuatan lama yang tidak harus sejalan dengan rezim Orde Baru.

## ABSTRACT

This thesis entitled “The Action-Reaction Relationship between New Order Government and the Petition 50 Group 1980-1998” examines how the government reactive relationship as a country with the Petition 50 Group as an interest group from 1980 to 1998. The main problem in this research is how the government reacts to the Petition 50 Group which voices correction and democratization of political life. To examine this problem, historical methods are used, namely heuristics, criticism, interpretation and historiography. As a framework for thinking, this thesis uses a political approach through the concepts of Hegemony, Anomic Interest Groups and Conflict. With the findings of the newest document sources from National Archive of Indonesia and more complete discussion, it is hoped that this research can complement existing research.

The New Order Government as the ruler took political policies to maintain the status quo while the Petition 50 Group has ideals of a more democratic political life. Differences in views regarding Pancasila and the 1945 Constitution lead to reactive conflicts between the two. The May 5 1980 Letter of Concern was the beginning of the Petition 50 Group's conflict with the New Order government. The hegemony of New Order government resulted in several controversial political policies. The Petition 50 group that started as a moral movement turned into an anomic interest group with the formation of a working group. Election Constitution, Party and Golkar Constitution and the Constitution on the Composition and Position of the MPR, DPR and DPRD were the main issues criticized by the Petition 50 Group from 1980 to 1991. As interest groups, they have a mutual relationship with other critical groups such as students, scholars and NGOs.

The government interests in the dominance of political life collided with the idea of democracy voiced by the Petition Group 50. On the existence of the Petition 50 Group, the government reacted reactively to the group's development. Repressive policies are taken by the government to curb their political activities, namely a ban on writing, a ban on community activities, blackouts, restrictions on business facilities, block and subversive legal cases. Interestingly, during 1991-1993 the government and the Petition 50 Group held a dialogue which resulted in a dispensation from the previous policy. The Petition 50 group was permitted to travel abroad, was invited to a state event and allowed to be covered by the press media. As an interest group with old figures the Petition Group 50 has a bargaining position that results in the government being willing to engage in dialogue and dispensation. This implication proves that during a repressive government there is an old force that does not have to be in line with the New Order regime.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang dan Permasalahan

Kekuatan oposisi selalu mengalami pasang surut dalam perpolitikan nasional Indonesia. Penguasa selalu mempunyai pengalaman yang unik dalam berhadapan dengan kekuatan diluar pemerintahan. Sejak zaman kolonial hingga sekarang diskursus mengenai hubungan oposisi perlu dilihat sebagai sebuah ide dalam memajukan peradaban.

Peristiwa G30S memunculkan nama Jenderal Soeharto sebagai pimpinan Kostrad (Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat) yang berhasil menumpas sisa-sisa gerakan tersebut, serta melambungkan namanya dalam peta politik nasional. Soeharto dilantik sebagai pejabat presiden pada Maret 1967 dan pada Maret 1968 dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) sebagai presiden. Kemudian diadakan pemilihan umum pada 1971 dan dipilih kembali oleh MPR pada 1972. Selama menjabat Soeharto selalu terpilih menjadi presiden setiap lima tahun sejak saat itu hingga 1998.<sup>1</sup>

Orde Baru muncul dengan dukungan dari berbagai golongan yang ingin melepaskan diri dari kekacauan kala itu. Rezim Orde Baru mengembangkan gaya politik yang paternalistik serta berusaha mendominasi kehidupan politik. Sebagian besar pembangunan ekonomi nasional bergantung pada perusahaan asing dan hanya terjadi sangat kecil pertumbuhan industri dalam negeri. Sentralisasi kekuatan ekonomi, politik, administrasi dan militer di tangan segelintir elit dalam pemerintahan Soeharto bahkan lebih besar jika dibandingkan pemerintahan kolonial Belanda.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 2013), hlm. 490.

<sup>2</sup>M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004* (Jakarta: Serambi, 2008), hlm. 588

Demi menciptakan stabilitas, pemerintah berusaha dengan cara menghegemoni permasalahan partai politik dan konflik ideologi. Pemilu pertama selama Orde Baru dimenangkan oleh Golkar pada 1971, dan partai-partai lain dipinggirkan melalui fusi partai pada 1973 yang melahirkan dua partai gabungan, yaitu Partai Persatuan Pembangunan/PPP dan Partai Demokrasi Indonesia.<sup>3</sup> Gagasan peyederhanaan partai dari Soeharto mirip dengan konsep Nasakom dari Soekarno.<sup>4</sup> Setelah memenangkan pemilu terjadi peristiwa kekerasan pada tanggal 15 Januari 1974 atau yang biasa disebut dengan peristiwa Malari, yaitu saat mahasiswa berdemonstrasi saat menjelang kedatangan Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka.

Tahun-tahun setelah Malari pemerintah melakukan kebijakan-kebijakan yang lebih otoriter. Perkembangan ekonomi menjadi isu utama, sementara rekonsiliasi politik diacuhkan dan terus melakukan cara-cara represif dan intimidatif. Tahap selanjutnya adalah menghilangkan konflik ideologi. Presiden Soeharto mengemukakan gagasan pertama kali tentang Pancasila sebagai asas tunggal seluruh bangsa Indonesia dalam Kongres Nasional Pramuka tanggal 14 Agustus 1976.<sup>5</sup> Soeharto mengajak seluruh warga negara untuk mengambil peranan aktif dalam memasyarakatkan Pancasila, karena Pancasila harus diresapi, dihayati dan diamalkan dalam kehidupan nyata. Pada tanggal 18 Maret 1978, para wakil rakyat mencapai kesepakatan untuk mengesahkan rumusan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), hasil kajian para ilmuwan tersebut menjadi sebuah keputusan berkekuatan hukum tetap pada tanggal 22 Maret 1978, yakni TAP MPR No. II MPR/1978. Sejak itu dimulailah program penataran P4 bagi seluruh warga negara pada setiap tingkatan. Para calon siswa, mahasiswa, pegawai negeri sipil,

---

<sup>3</sup>Suwarno, *Sejarah Politik Indonesia Modern* (Yogyakarta: Ombak, 2015), hlm. 75.

<sup>4</sup>Taufik Abdullah, dan A.B Lopian, *Indonesia Dalam Arus Sejarah: Orde Baru dan Reformasi* (Ichtisar Baru van Hoeve,2012), hlm. 59.

<sup>5</sup>Abdullah, dan Lopian, *Indonesia*, hlm. 60.

tentara, dan kepolisian wajib mengikuti penataran P4.<sup>6</sup> Sejak awal program P4 sudah menuai kritik dan cemooh dari kaum intelektual.<sup>7</sup> Sementara dari beberapa tokoh agama menolak P4, karena khawatir bahwa program tersebut akan menggantikan peranan agama dengan Pancasila. Banyak kasus yang dilakukan oleh rezim Soeharto yang malah menyimpang dari konsep P4 yang justru merusak konsep tersebut. Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme semakin marak dalam pemerintahan yang dilakukan oleh Soeharto, keluarganya dan kroninya. Soeharto semakin menganggap dirinya adalah manifestasi daripada Pancasila, dan mempunyai pola pikir bahwa kepentingan pribadinya adalah kepentingan masyarakat umum.

Sejak awal Orde Baru, dominasi tentara terhadap negara menjadi pembenaran dengan alasan bahwa masyarakat sipil masih memerlukan kepemimpinan kuat yang hanya bisa diberikan oleh tentara. Pemerintahan Orde Baru sangat identik dengan sistem dwifungsi ABRI.<sup>8</sup>

Pada tanggal 9 Maret 1978 beberapa perwira senior Angkatan Darat menghadap KSAD Jenderal Widodo. Pada kesempatan itu Widodo mengemukakan ide untuk membentuk lembaga studi sosial yang dapat menghasilkan konsep-konsep konstruktif tentang pelaksanaan dwifungsi ABRI. Gagasan ini langsung diterima oleh para hadirin yang kemudian dikukuhkan dengan Surat Keputusan KASAD (Skep/29/V/1978) tanggal 26 Mei tentang pembentukan Forum Studi dan Komunikasi (Fosko) Purnayuda.<sup>9</sup> Saat masih aktif, saran dan masukan fosko dilaporkan ketuanya Letjen Seogih Arto kepada pemerintah. Selanjutnya, pemerintah mencurigai pergerakan didalam tubuh fosko sebagai upaya menentang pemerintah dengan memanfaatkan angkatan darat. Akhirnya Fosko dibubarkan

---

<sup>6</sup>Abdullah, dan Lopian, *Indonesia*, hlm. 60.

<sup>7</sup>Ricklefs, *Sejarah*, hlm. 637.

<sup>8</sup>Robert Cribb dan Audrey Kahin, *Kamus Sejarah Indonesia* (Depok: Komunitas Bambu, 2012), hlm. 124.

<sup>9</sup>Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI* (Jakarta: Balai Pustaka, cet.4, 2010), hlm. 608.

pada 26 Mei 1979. Fosko beranggapan bahwa seharusnya dwifungsi ABRI memiliki sifat *mission oriented* bukan hanya memberikan pekerjaan kepada tentara. Peran ABRI dalam organisasi politik disarankan agar ABRI harus berdiri diatas segala-galanya bukan sekedar milik dari satu golongan saja yaitu Golongan Karya.<sup>10</sup>

Pada maret 1980 Presiden Soeharto membuat sejumlah pidato yang menyatakan bahwa dia adalah perwujudan Pancasila, menjelaskan bahwa Pancasila mendapat ancaman dari nasionalisme, agama, dan ideologi-ideologi lain, dan meminta angkatan bersenjata untuk membelanya melawan tantangan-tantangan ini.<sup>11</sup>

Tanggal 5 Mei 1980 muncul sebuah petisi yang berjudul *Pernyataan Keprihatinan*, yang ditandatangani oleh 50 orang. Diantara mereka adalah A.H Nasution, Ali Sadikin, Azis Saleh, Hoegeng dan sebagian besar adalah tokoh-tokoh sipil antara lain M. Natsir, Anwar Haryono, S.K. Trimurti, Manai Sophiaan, Slamet Bratanata, Syafruddin Prawiranegara, A.M Fatwa dan lainnya.<sup>12</sup> Petisi yang kemudian melalui Ali Murtopo dipopulerkan dengan sebutan “Petisi 50” ini merupakan tanggapan, kritik sekaligus pertanyaan-gugatan atas pidato tanpa teks Presiden pada rapim ABRI 1980 di Pekanbaru (27 Maret 1980) dan sambutan Presiden pada HUT KOPASSANDHA 1980 di Cijantung (16 April 1980).<sup>13</sup> Pokok isi petisi ini adalah kritikan keprihatinan terhadap Presiden yang telah melakukan penyelewengan penafsiran terhadap Pancasila dengan menganggap dirinya seolah-olah sebagai perwujudan Pancasila.

Pada tahun 1980an pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan politik yang dianggap menyimpang oleh Kelompok Petisi 50. UU Pemilu, UU Parpol dan

---

<sup>10</sup>Poesponegoro dan Notosusanto, *Sejarah*, hlm. 609.

<sup>11</sup>Cribb dan Kahin, *Kamus*, hlm. 427.

<sup>12</sup>Poesponegoro dan Notosusanto, *Sejarah*, hlm. 609

<sup>13</sup>Eep Saefulloh Fatah, *Konflik, Manipulasi dan Kebangkrutan Orde Baru: Manajemen Konflik Malari, Petisi 50 dan tanjung Priok* (Jakarta: Burung Merak Press, 2010), hlm. 220.

Golkar dan UU Susunan MPR, DPR dan DPRD merupakan contoh isu yang dikritik oleh Kelompok Petisi 50. Sebagai negara, pemerintah berusaha mempertahankan *status quo* dengan peraturan-peraturan yang membuat elemen pemerintah (Golkar dan ABRI) mendominasi kehidupan politik nasional. Dengan pertimbangan bahwa pemerintah menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban. Dalam partisipasi politik demokrasi terdapat kelompok-kelompok yang melakukannya secara non-konvensional seperti pembuatan petisi, demonstrasi, mogok dan sebagainya. Kemunculan Kelompok Petisi 50 merupakan salah satu kelompok yang berkepentingan menyuarakan demokratisasi dalam bidang politik nasional. Oleh sebab itu timbul konflik dalam memandang permasalahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sikap kritis tersebut mendapat reaksi dari pemerintah, sehingga timbul sikap-sikap represif terhadap Kelompok Petisi 50.

Pemerintah melalui Kopkamtib melakukan rekasi keras, dengan kebijakan memasukkan nama mereka dalam “daftar hitam” dari semua kegiatan masyarakat.<sup>14</sup> Orang-orang yang berada dalam daftar tersebut mengalami pembatasan-pembatasan dalam kehidupan sehari-hari khususnya menyangkut kegiatan politik. Pembatasan tersebut berupa pencekalan, pemberedelan tulisan, *black out*, larangan dalam acara kemasyarakatan, pembatasan fasilitas bisnis hingga kasus hukum subversif.

Pemerintah mencoba melakukan pendekatan alternatif dengan melakukan dialog dengan Kelompok Petisi 50. Pada tahun 1991 serangkaian dialog dilakukan oleh Kelompok Petisi 50 dengan beberapa aparat dan instansi pemerintah dalam usahanya untuk memperoleh hak-hak yang dibatasi terutama masalah cekal. Dialog yang dilakukan oleh pemerintah menarik untuk menjadi pembahasan dalam penelitian sejarah. Beberapa penelitian sebelumnya belum membahas dialog semacam ini secara komprehensif, sehingga perlu untuk menambahkan perspektif yang lebih utuh dan baru.

---

<sup>14</sup>Atmadji Sumarkidjo, *Jenderal M.Jusuf: Panglima Para Prajurit* (Jakarta, Kata Hasta Pustaka, 2006), hlm 241.

Tema mengenai peristiwa Petisi 50 mempunyai keunikan khusus yang membedakan dengan peristiwa lain dalam hal manajemen politik pemerintah Orde Baru. Perbedaan perspektif mengenai asas-asas demokrasi antara pemerintah dan Kelompok Petisi 50 yang merupakan tokoh-tokoh nasional serta pernah berafiliasi dengan Soeharto. Manajemen pada konflik politik yang dilakukan pemerintah juga berbeda dari konflik politik lain. Dalam konflik Petisi 50 ini pemerintah melakukan beberapa pemakluman, dari kebijakan yang dikenakan terhadap penandatanganan sebelumnya. Sumber-sumber dokumen pemerintah mengenai tema ini yang baru dibuka pada tahun-tahun belakangan, dapat digunakan sebagai pembaharuan untuk menambah khazanah keilmuan sejarah, sehingga mampu memberikan perspektif yang lebih utuh.

Permasalahan utama dari penelitian ini adalah bagaimana pemerintah bereaksi terhadap Kelompok Petisi 50 yang menyuarakan koreksi dan demokratisasi kehidupan politik. Dari pemaparan dan uraian dalam skripsi ini, dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan Kelompok Petisi 50 dan bagaimana kegiatannya?
2. Bagaimana reaksi pemerintah terhadap Kelompok Petisi 50?
3. Bagaimana akhir dari dialog dan dispesasi politik antara pemerintah dengan Kelompok Petisi 50?

## **B. Ruang Lingkup**

Terdapat tiga unsur utama dalam setiap penelitian sejarah yang selalu ada pada sebuah peristiwa yang dikaji. Antara lain adalah subjek sejarah (manusia), unsur spasial (tempat), dan unsur temporal (waktu). Semua unsur tersebut harus terintegrasi ke dalam sebuah rentetan eksplanasi ilmiah dan untuk menghilangkan narasi yang bersifat mitologis. Sehubungan dengan hal itu diperlukan pembatasan terhadap objek penelitian yang akan dikaji. Batasan kajian dalam penelitian skripsi ini terdiri atas:

Ruang lingkup spasial dalam penelitian ini adalah batasan ruang kajian dari penelitian ini. Batasan tempat skripsi ini meliputi cakupan nasional Indonesia

berdasarkan Petisi 50 yang ditujukan kepada pemerintah pusat Republik Indonesia. Oleh karena itu kebanyakan peristiwa yang berhubungan dengan permasalahan tersebut berada di Jakarta. Perkembangan polemik Petisi 50 tak hanya membuat para pelaku kerap kali disebut subversif dan mengganggu keamanan umum. Beberapa tokoh dipenjara dan lainnya dikenakan cekal (cegah dan tangkal). Hal ini tidak secara spesifik terjadi di suatu daerah, namun konteksnya harus dilihat secara nasional.

Ruang lingkup temporal menjadi batasan dalam penulisan penelitian ini, batasan ini untuk memperjelas cakupan waktu selama peristiwa terjadi. Berlatar tahun 1980-1998, dipilih sebagai periode dalam penelitian ini. Tahun 1980 dipilih sebagai titik awal karena “Surat Keprihatinan“ dikeluarkan pada 5 Mei 1980 yang berisi pernyataan keprihatinan kepada Soeharto. Tahun ini merupakan permulaan dalam kajian penelitian. Selanjutnya tahun 1998 dipilih sebagai akhir temporal karena tahun tersebut merupakan berakhirnya rezim Orde Baru. Selama berkuasa, pemerintah mengalami perkembangan terhadap permasalahan Petisi 50 dari tahun ke tahun.

Dalam lingkup keilmuan, penelitian ini mempunyai cakupan di bidang politik . Bidang politik karena Petisi 50 memuat hubungan antara pemerintah dan kelompok oposisi dari masyarakat sipil. Perilaku-perilaku politik Orde Baru dapat dijelaskan dengan teori-teori politik sebagai eksplanasi kajian. Pendekatan politik menjadi landasan yang sangat berpengaruh dalam penelitian ini sebagai kerangka berpikir dalam menjelaskan peristiwa-peristiwa yang diteliti.

### C. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan ruang lingkup yang telah diuraikan diatas, penelitian ini memiliki arah dan tujuan sehingga kiranya dapat dapat menjadi indikator acuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini antara lain; *pertama*, menjelaskan apa yang dimaksud dengan Kelompok Petisi 50 dan bagaimana kegiatannya selama proses politik. *Kedua*, menjelaskan berbagai reaksi pemerintah terhadap Kelompok Petisi 50 yang bermula dari “Surat Keprihatinan” 5 Mei 1980 hingga berakhirnya rezim Orde Baru tahun 1998. *Ketiga*, menjelaskan akhir dari dialog Kelompok Petisi 50 pada tahun 1991 sampai 1995.

### D. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari plagiatisme karya diperlukan kajian pustaka yang harus dijabarkan dalam proses penelitian. Hasil-hasil penelitian yang telah ada dijadikan sebagai referensi, acuan dan komparasi terhadap skripsi ini maupun karya-karya ilmiah yang akan datang.

Kajian pustaka dalam penelitian ini banyak mengambil dari literatur-literatur mengenai sejarah Indonesia kontemporer, politik, dan sosial. Sejatinya agar mendapat perspektif yang berimbang. Kajian politik pada masa Orde Baru harus dilakukan uji kritik secara mendalam agar mendapat hasil yang faktual. Karena seperti yang kita ketahui bahwa, ada indikasi *group prejudice*, atau kepentingan-kepentingan dalam literatur pada masanya.

Pustaka yang pertama adalah *Petisi 50 (1980-1998) suara penentang yang dibungkam* oleh Ade Munajat.<sup>15</sup> Adalah thesis dari program studi Ilmu Sejarah Universitas Indonesia yang ditulis pada tahun 2006. Karya tersebut membahas rekam jejak tokoh-tokoh sentral Petisi 50, serta pembungkaman yang dilakukan pemerintah Orde Baru pada tahun 1980-1998. Relevansi penelitian tersebut dengan

---

<sup>15</sup>Ade Munajat, “Petisi 50 (1980-1998) suara penentang yang dibungkam” (Tesis Pada Program Pascasarjana Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, 2006).

skripsi ini adalah untuk mengetahui sikap-sikap politik pemerintah Orde Baru juga perbandingan dengan sumber-sumber terbaru yang ditemukan pada skripsi ini.

Untuk menghindari plagiarisme, ada signifikansi perbedaan antara penelitian ini dengan tesis tersebut. Meskipun memiliki topik dan temporal yang sama, terdapat beberapa perbedaan substansial dalam pembahasan. *Pertama, Petisi 50 (1980-1998) suara penentang yang dibungkam* oleh Ade Munajat dalam karyanya menggunakan sumber berupa wawancara dengan para pelaku sejarah langsung dan dokumen Kelompok Petisi 50 seperti contohnya surat-surat Kelompok Petisi 50. Sementara penelitian ini menggunakan sumber-sumber pemerintah seperti risalah rapat koordinasi sekretariat menteri koordinasi bidang politik dan keamanan, laporan Badan Koordinasi Intelijen Negara serta beberapa dokumen yang diterbitkan Kelompok Petisi 50.

Perbedaan penggunaan sumber disebabkan karena, akses dokumen yang digunakan skripsi ini, baru dibuka pada tahun 2017 oleh Arsip Nasional Republik Indonesia. Penelitian ini juga tidak menggunakan wawancara langsung seperti tesis tersebut, tetapi menggunakan wawancara tidak langsung berupa berita/tulisan hasil wawancara oleh media massa. *Kedua*, adalah mengenai pembahasan dalam tulisan. Pada karya Ade Munajat, Bab II berisi protagonisme kelahiran Petisi 50 dengan menguraikan rekam jejak para antagonisme politik seperti A.H. Nasution, Ali Sadikin, dan M. Natsir. Sementara penelitian ini berfokus pada manuver politik pemerintah Orde Baru yang diantaranya memuat paradigma Pancasila. Pada Bab IV tesis tersebut tidak membahas pemberedelan atau pembatasan pada karya tulis seperti buku dan brosur, juga tidak membahas dialog yang dilakukan pemerintah, sementara penelitian ini membahas hal-hal tersebut.

Buku kedua adalah *Konflik, manipulasi dan kebangkrutan Orde Baru: manajemen konflik Malari, Petisi 50 dan Tanjung Priok* yang ditulis oleh Eep Saefulloh Fatah.<sup>16</sup> Berisi tentang konflik-konflik pada era Orde Baru yang dikaji menggunakan konsep-konsep politik. Buku tersebut berfokus pada hubungan

---

<sup>16</sup>Eep Saefulloh Fatah, *Konflik, Manipulasi dan Kebangkrutan Orde Baru: Manajemen Konflik Malari, Petisi 50 dan Tanjung Priok* (Jakarta: Burung Merak Press, 2010).

negara dengan masyarakat yang bersifat konfliktual, serta kebijakan yang diberikan oleh pemerintah Orde Baru dalam mengelola konflik-konflik tersebut. Sehingga, legitimasi kekuasaan tetap kokoh dan keamanan sosial tetap stabil. Buku ini sangat penting bagi penelitian ini karena memuat manajemen konflik yang dilakukan Orde Baru, serta penjabaran konsep-konsep politik yang sesuai dengan keadaan serta karakteristik rezim. Terutama pada pembahasan Petisi 50, karya tersebut memuat konsep-konsep konflik pada Petisi 50, hegemoni kekuasaan pemerintah yang dihadapkan pada kelompok oposisi dan informasi-informasi penting lainnya. Yang membedakan karya Eep Saefulloh Fatah dengan penelitian ini yaitu; *pertama* adalah temporal. Penelitian ini memiliki topik bahasan sampai tahun 1998, sedangkan Buku *Konflik, Manipulasi dan Kebangkrutan Orde Baru: manajemen Konflik Malari, Petisi 50 dan Tanjung Priok*, dalam pembahasan petisi 50 hanya sampai peristiwa Tanjung Priok. Yang *kedua* adalah buku ini tidak menjelaskan peristiwa secara kronologis namun lebih pada penjabaran teori politik dengan mengaplikaskannya dalam sebuah peristiwa. Jadi meskipun saling bertautan dalam hal politik, sejatinya penelitian dan buku ini memiliki perbedaan. Penelitian ini memiliki generalisasi kausal, yaitu tentang kesinambungan, perkembangan dan perubahan dalam Ilmu Sejarah.

Buku ketiga berjudul *Koridor Menuju Demokrasi: B.J. Habibie, Petisi 50 dan Partisipasi Politik Masyarakat* karya A. Makmur Makka.<sup>17</sup> Buku ini berisi tentang salinan wawancara tokoh-tokoh politik dari berbagai media, kemudian dihimpun dalam sebuah buku. Pembahasan seputar B.J. Habibie dan Kelompok Petisi 50 merupakan fokus utama didalamnya. Mulai dari kunjungan ke PT.PAL hingga pernyataan-pernyataan politik dikemas dengan gaya jurnalistik. Dengan kumpulan wawancara tersebut, buku ini dapat menyajikan sumber-sumber penelitian yang diperlukan agar dapat dianalisis oleh penulis. Relevansi karya tersebut dengan skripsi ini adalah untuk mengetahui pernyataan-pernyataan dari pejabat pemerintah dalam upaya dialog dan tanggapan terhadap Kelompok Petisi 50. Karya A. Makmur

---

<sup>17</sup>A. Makmur Makka, *Koridor Menuju Demokrasi: B.J. Habibie, Petisi 50 dan Partisipasi Politik Masyarakat* (Jakarta: Pustaka Cidesindo, 1997).

Makka jelas berbeda dengan penelitian ini. Buku ini memiliki temporal tahun 1993, sedangkan penelitian memiliki temporal tahun 1980 sampai 1998 saat Presiden Soeharto mundur. Maka tentu bahasan dari buku tersebut tidak sebanyak penelitian ini. Buku tersebut berfokus pada upaya rekonsiliasi dan pernyataan-pernyataan yang menguatkan upaya tersebut oleh kedua belah pihak. Selanjutnya adalah perbedaan bidang keilmuan, dimana skripsi ini menggunakan metode sejarah sedangkan karya tersebut merupakan hasil jurnalistik yang dijadikan dalam karya tulis. Jadi buku tersebut tidak membahas secara naratif, deskriptif, dan interpretasi seperti penelitian sejarah.

Pustaka keempat berjudul *Soeharto dan Barisan Jenderal Orba: Rezim Militer Indonesia 1975-1983* yang ditulis oleh David Jenkins. Buku ini membahas mengenai jenderal-jenderal Orde Baru baik dalam lingkaran Presiden Soeharto dengan mereka yang bersebarangan dengan presiden. Melalui serangkaian wawancara dan penelitian saat di Indonesia, Jenkins menjelaskan bagaimana hubungan antara jenderal-jenderal ABRI yang berpengaruh dengan Soeharto. Serta bagaimana manajemen Soeharto terhadap jenderal-jenderal tersebut, dalam rangka mempertahankan kekuasaannya. Dinamika dalam internal ABRI seperti kelompok pragmatis dan kelompok idealis dijelaskan secara komprehensif dalam tulisannya. Pola-pola dalam polemik internal ABRI mampu dijelaskan oleh penulis, sehingga mampu mengembagkan teori-teori yang relevan dalam karya tersebut. Relevansi karya Jenkins dengan penelitian penulis adalah sebagai latar belakang rangkaian peristiwa sebelum penandatanganan Petisi 50, yang salah satu objek pembahasannya adalah ABRI. Perbedaan penelitian ini dengan buku tersebut adalah; temporal yang berbeda karena buku tersebut hanya sampai 1983 serta pembahasan, karena meskipun menyajikan fakta-fakta kejadian Petisi 50 pada tahun 1980, buku tersebut tidak membahas aktifitas-aktifitas Kelompok Petisi 50 setelah tahun 1983. Terakhir, buku tersebut tidak membahas kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah terhadap Kelompok Petisi 50.

Dari pemaparan hasil karya-karya penelitian tersebut, perbedaan yang paling substansial berada dalam penggunaan sumber. Skripsi ini menggunakan sumber-sumber dokumen pemerintah yang baru dibuka melalui Arsip Nasional Republik

Indonesia pada tahun 2017. Sedangkan sumber-sumber penelitian diatas, menggunakan dokumen dan kesaksian Kelompok Petisi 50. Sehingga terdapat beberapa fakta sejarah yang belum dijelaskan oleh penelitian-penelitian sebelumnya seperti contohnya, penyitaan brosur oleh pemerintah kota Jakarta Pusat, *geruisloss* oleh Kopkamtib hingga pelarangan oleh Kejaksaan Agung. Dalam memahami permasalahan Petisi 50 secara lebih luas, dialog yang dilakukan pemerintah perlu diulas lebih lanjut agar mendapat intepretasi baru. Berbeda dengan penelitian diatas yang banyak membahas represifitas pemerintah, skripsi ini juga membahas dialog yang dilakukan pemerintah. Oleh sebab itu diharapkan skripsi ini dapat menjadi pelengkap dari penelitian-penelitian sebelumnya.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Skripsi ini menggunakan kerangka pemikiran untuk merekonstruksi hasil penelitian. Oleh sebab itu perlu untuk mengemukakan kerangka pemikiran mengenai reaksi, petisi, dan represi. Dalam penelitian ini pemerintah Orde Baru yang dimaksud adalah tata pemerintahan Indonesia yang berlangsung sejak tanggal 11 Maret 1966 hingga 20 Mei 1998. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia reaksi adalah respons suatu aksi.<sup>18</sup> Reaksi Kelompok Petisi 50 adalah respon terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang dinilai menyimpang dari UUD 1945 dan Pancasila. Reaksi pemerintah merupakan serangkaian aksi yang timbul akibat kegiatan-kegiatan dan pertentangan gagasan antara pemerintah dengan Kelompok Petisi 50. Petisi adalah permintan, permohonan atau pengajuan keberatan yang biasanya dilakukan atau diajukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada pemerintah atau Dewan Perwakilan Rakyat.<sup>19</sup> Petisi 50 mengacu pada “Surat Keprihatinan” tanggal 5 Mei 1980 yang ditandatangani oleh lima puluh orang masyarakat. Kemudian nama tersebut dipopulerkan oleh pejabat pemerintah sebagai sebutan kepada kelompok penandatangan.

---

<sup>18</sup>Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru* (Jakarta: PT Media Pustaka Phoenix, 2009), hlm. 693.

<sup>19</sup> B.N. Marbun, *Kamus Politik* (Jakarta: Sinar Harapan, 2005), hlm. 436.

Dalam kaitannya dengan reaksi pemerintah, perlu untuk mengemukakan kerangka pemikiran mengenai represif. Represif artinya bersifat represi (menekan, mengekang, menahan atau menindas).<sup>20</sup> Tindakan represif pemerintah terhadap Kelompok Petisi 50 adalah pengekangan hak-hak sipil. Hal tersebut berupa pelarangan tulisan, larangan kegiatan kemasyarakatan, *blackout*, pembatasan fasilitas bisnis, cekal dan kasus hukum subversif.

Surat keprihatinan dan kegiatan-kegiatan Kelompok Petisi 50 merupakan partisipasi politik dalam kehidupan demokrasi. Secara umum partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah.<sup>21</sup> Partisipasi politik Kelompok Petisi 50 terbentur dengan hegemoni rezim Orde Baru sehingga menyebabkan perbedaan. Perbedaan tersebut berujung pada konflik gagasan yang mengakibatkan reaksi pemerintah.

Kelompok Petisi 50 memiliki persamaan nilai, tujuan dan kepentingan antar anggota sebagai identitas kelompok. Melalui kegiatan menggolongkan diri dengan orang lain menjadi suatu kelompok, diharapkan tuntutan mereka akan lebih didengar oleh pemerintah. Tujuan kelompok kepentingan ialah mempengaruhi kebijakan pemerintah agar lebih menguntungkan mereka. Oleh sebab itu mereka dapat disebut sebagai kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan dapat diartikan sebagai setiap organisasi yang berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah tanpa berkehendak memperoleh jabatan publik. Dalam hal ini Kelompok Petisi 50 dapat disebut sebagai kelompok anomik. Menurut Gabriel Almond, kelompok anomik adalah kelompok yang terbentuk di antara unsur-unsur masyarakat secara spontan dengan menggunakan bentuk-bentuk partisipasi politik non-konvensional (pengajuan petisi, demonstrasi, konfrontasi, mogok dan

---

<sup>20</sup> Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru* (Jakarta: PT Media Pustaka Phoenix, 2009), hlm. 710.

<sup>21</sup>Budiarjo, *Dasar-dasar*, hlm.367.

sebagainya).<sup>22</sup> Biasanya terdapat rasa kekecewaan dan ketidakpuasan yang menjadi faktor munculnya kelompok tersebut.

Demokrasi Pancasila yang dicanangkan oleh rezim Orde Baru sangat berpengaruh dalam kehidupan politik masyarakat. Kebijakan dan tindakan yang diambil pemerintah merupakan gejala-gejala politik yang unik. Melalui ABRI dan Golkar sebagai pendukungnya, pemerintah mampu mendominasi kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga menimbulkan hegemoni. Penjelasan secara umum, hegemoni merupakan penguasaan oleh pihak yang lebih kuat terhadap yang lebih lemah (dalam bidang politik, militer, ekonomi, perdagangan, olahraga dan sebagainya). Teori hegemoni dapat dielaborasi melalui penjelasan tentang basis dan supremasi menurut Antonio Gramsci. Bahwa supremasi sebuah kelompok mewujudkan diri dalam dua cara, sebagai dominasi dan sebagai kepemimpinan intelektual dan moral. Dan di satu pihak, sebuah kelompok sosial mendominasi kelompok-kelompok oposisi untuk menghancurkan atau menundukkan mereka. Kelompok sosial tersebut kemudian menjadi dominan ketika dia mempraktekkan kekuasaan, tapi bahkan bila dia telah memegang kekuasaan penuh di tangannya, dia masih harus terus memimpin.<sup>23</sup>

Hubungan antara Kelompok Petisi 50 sebagai kelompok kepentingan dengan pemerintah berupa perbedaan pandangan mengenai Pancasila dan UUD 1945, sehingga menimbulkan konflik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia konflik adalah keberadaan dua keinginan/perasaan yang tidak bisa dipersatukan dan saling bertentangan satu sama lain, yang menimbulkan ketegangan emosi atau psikis.<sup>24</sup> Konflik dapat merupakan sebuah proses dalam pembentukan, penyatuan dan pemeliharaan struktur sosial. Dari berbagai situasi konflik, Lewis A. Coser menjelaskan mengenai konflik realistik. Konflik yang realistik, berasal dari

---

<sup>22</sup>Mohtar Mas'ood dan Colin Mac Andrews, *Perbandingan Sistem Politik* (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 2001), hlm.54.

<sup>23</sup>Nezar Patria dan Andi Arief, *Antonio Gramsci Negara & Hegemoni* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm.117.

<sup>24</sup>Phoenix, *Kamus Besar*, hlm. 472.

kekecewaan terhadap tuntutan-tuntutan khusus yang terjadi dalam hubungan dan dari perkiraan kemungkinan keuntungan para partisipan, dan yang ditujukan pada obyek yang dianggap mengecewakan.<sup>25</sup>

#### **F. Metode Penelitian**

Sebagai sebuah studi tentunya sejarah harus mampu membedakan diri dengan ilmu yang lain khususnya eksaktat. Lebih daripada itu hal-hal yang menyangkut dengan proses penelitian harus mampu untuk membuat susunan metode agar sesuai dengan kaidah kesejarahan. Perkembangan sejarah Indonesia hendak diberi landasan selaras dengan tuntutan ilmu sejarah. Suatu kondisi untuk mewujudkannya ialah adanya metodologi dan teori.<sup>26</sup>

Metode sangat penting dalam penelitian sejarah sebagai pedoman, aturan atau prinsip-prinsip yang secara sistematis digunakan dalam penelitian. Landasan utama metode sejarah ialah bagaimana menangani bukti-bukti sejarah dan bagaimana menghubungkannya.<sup>27</sup> Penelitian Sejarah mempunyai lima tahap, yaitu (1) pemilihan topik, (2) pengumpulan sumber, (3) verifikasi (4) Interpretasi: analisa dan sintesis, dan (5) penulisan.<sup>28</sup> Atau secara singkatnya yaitu Heuristik, kritik, interpretasi dan Historiografi.

Heuristik dilakukan dengan mencari sumber primer dan sekunder, baik berupa dokumen maupun keterangan pengalaman empiris. Sumber awal berasal dari data yang diperoleh dari Arsip Nasional Republik Indonesia yang berupa; arsip sekretariat wakil presiden, risalah-risalah staff dan menteri, risalah Departemen Penerangan, laporan Badan Koordinasi Intelijen Nasional dan naskah-naskah

---

<sup>25</sup>Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.110.

<sup>26</sup>Sartono Kartodirjo, *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia* (Yogyakarta: Ombak, 2014), hlm.89.

<sup>27</sup>William H. Fredeick dan Soeri Soeroto, *Pemahaman Sejarah Indonesia: Sebelum dan Sesudah Revolusi* (Jakarta: LP3S, 2005), hlm.13.

<sup>28</sup>Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Tira Wacana, 1995), hal.69.

pidato presiden. Penulis juga menggunakan sumber tak langsung, seperti kumpulan salinan surat yang telah dibukukan, yang ditulis dan diterbitkan oleh Panitia Peringatan ke-25 Petisi 50, serta buku Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang diterbitkan oleh Sekretariat Jendral DPR-RI. Sumber sekunder yaitu, surat kabar, catatan pribadi pelaku sejarah yang masih hidup dan wawancara. Penulis menggunakan wawancara tak langsung, yang telah dilakukan oleh berbagai media massa kepada pelaku sejarah. Sejumlah pustaka dan jurnal yang diperoleh dari perpustakaan, koleksi pribadi dan media luring juga digunakan dalam penelitian ini.

Kritik Sumber, adalah kegiatan untuk menguji sumber-sumber sejarah sehingga mendapatkan fakta yang diperlukan dalam penelitian. Melalui proses verifikasi inilah sumber memperoleh keontektikan dan kredibilitas ilmiah. Kritik sumber dibagi menjadi dua yaitu ekstern dan intern. Untuk menguji keaslian sebuah sumber sejarah dilakukan kritik ekstern dengan cara memberi beberapa pertanyaan pada sumber sejarah tersebut. Kritik intern dilakukan untuk menentukan kredibilitas sebuah sumber sejarah. Pada bagian ini, penulis melakukan seleksi sumber dan informasi, dan tidak ketinggalan pula penulis juga melakukan perbandingan antara satu sumber dan sumber yang lain, sehingga dapat mendapat kesimpulan bahwa sebuah sumber informasi tersebut relevan, kredibel dan layak dipertanggung jawabkan sebagai sumber sejarah dari penelitian skripsi ini.

Interpretasi merupakan langkah untuk mencari hubungan antara fakta-fakta yang ditemukan dalam peristiwa serta merangkainya menjadi sebuah cerita secara kronologis dan ilmiah. Tahap ini sering disebut sebagai bias subjektivitas, karena proses interpretasi yang dilakukan pada sumber-sumber yang ditemukan. Oleh sebab itu sejarawan harus mencantumkan data dan keterangan yang diperoleh.

Historiografi merupakan tahap akhir dari seluruh rangkaian penelitian sejarah. Tahapan ini adalah proses penulisan kembali penelitian sejarah yang telah dilakukan. Fakta yang telah melalui proses sintesa kemudian dijabarkan dalam bentuk tulisan berbahasa Indonesia agar dapat dipahami oleh khalayak umum. Melalui metode sejarah ini penulis dapat membuat kesimpulan dari berbagai fakta yang telah diperoleh.

### G. Sistematika Penulisan

Dalam skripsi ini yang berjudul: “Hubungan Aksi-Reaksi antara Pemerintah Orde Baru dan Kelompok Petisi 50 Tahun 1980-1998” bermula dengan “*Pendahuluan*” atau BAB I yang berisi dasar-dasar dan panduan dalam penelitian ini, yaitu (a) Latar Belakang dan Permasalahan, (b) Ruang Lingkup, (c) Tujuan Penelitian, (d) Tinjauan Pustaka, (e) Kerangka Pemikiran, (f) Metode Penelitian serta (g) Sistematika Penulisan.

Landasan Penelitian yang telah dituangkan dalam permasalahan Bab I, yang merupakan fokus bahasan skripsi ini, akan dijelaskan dan dianalisis pada bab selanjutnya yaitu Bab II sampai dengan Bab IV. Dalam Bab II berjudul *Prolog Kelompok Petisi 50* akan menjelaskan tentang Kondisi politik Orde Baru sebelum Surat Keprihatinan. Membahas fenomena-fenomena politik dari awal Orde Baru sampai pra surat keprihatinan. Topik ini menjadi landasan historis keadaan politik nasional, sehingga memperoleh pemahaman yang berkesinambungan dengan Kelompok Petisi 50 dan reaksi pemerintahan Orde Baru.

Pembahasan yang ketiga adalah BAB III yang berjudul *Pertumbuhan dan Reaksi Kelompok Petisi 50 terhadap Pemerintah Orde baru*. Membahas kegiatan yang dilakukan Kelompok Petisi 50 yang berawal dari Surat Keprihatinan sampai pada mundurnya Soeharto dari jabatan Presiden. Kemudian membahas hubungan antara Kelompok Petisi 50 dengan kelompok kritis lain. Sehingga memiliki pemahaman aksi-reaksi Kelompok Petisi 50 yang mendapat reaksi pemerintah.

Bab IV merupakan bagian yang paling penting dalam penelitian ini. Topik dalam bab ini merupakan fokus kajian dengan judul “*Reaksi Pemerintah Terhadap Kelompok Petisi 50*”. Pembahasan tentang respon pemerintah terhadap penandatanganan beserta aktivitas-aktivitasnya yang telah dianalisis oleh penulis. Reaksi pada bab ini dibagi menjadi dua sub bab, yaitu *pertama* Reaksi Pemerintah terhadap Kelompok Petisi 50. *Kedua*, Proses dialog Pemerintah dengan Kelompok Petisi 50.

Pembahasan yang telah dirangkai dari Bab II sampai Bab IV kemudian dirangkum menjadi sebuah kesimpulan pada Bab V, yang dimaksudkan sebagai jawaban dari permasalahan penelitian yang diajukan.